DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Abdullah M., *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen: Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

Darda Syahrizal. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Sleman: MediaPressindo, 2013.

Fadli, Moh. *Peraturan Delegasi di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2001.

Harrys Pratama Teguh, dan Ojarudin Ritonga. *HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA: Pedoman dan Praktik Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*. Sleman: Penerbit Andi, 2022.

Ishad. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.

Muhamad Sadi Is, S. H. I., and Dr Kun Budianto M.Si S. Ag , S. H. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Muhammad Syahrum, *PERADILAN SEMU HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA*. CV. DOTPLUS Publisher, 2022.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Paramitha, Amelia Ayu, Ibnu Sam Widodo, Fakhry Amin, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Hutrin Kamil, Mohamad Hidayat Muhtar, Achmad Taufik, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Polin, Filmon Mikson. *MEMAHAMI HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA*. Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Sangadji. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*.

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Sari, Elidar, and Hadi Iskandar. *PENGANTAR HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA*. Lhoksemauwe: BieNaEdukasi, 2014.

Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2017.

Titik Triwulan T.. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

_____ . *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sleman: PT Kanisius, 2023.

Wijoyo, Suparto. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi : Peradilan Tata Usaha Nagara*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Jurnal

Setia Utomo Nim. "TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.PTK *jo* Putusan 282/B/2020/PT.TUN.JKT)." *Jurnal Fatwa Hukum* 6, no. 4 (2023).

Afiah, Nadhita. "TINDAK LANJUT PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG." Diploma, Universitas Andalas, 2024.

Aguw, Ervina Merianti. "KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAHAN." *LEX PRIVATUM* 15, no. 1 (2025): 1.

Aji, Aniko, Jefik Zulfikar Hafizd, and Am'mar Abdullah Arfan. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Untuk Mewujudkan

Pemerintahan Yang Baik." *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 2.

Akbar, Muhamad Aksan. "Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 571–86.

Akbar, Muhammad. "PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK." *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (2021).

Al Amin, Ahmat Yusuf, and Arif Wibowo. "PENYELESAIAN SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 128–34.

Alfaridzi, Asep Misbach, Muhammad Hilmi Naufal Aflah, and Najmi Rabbani. "KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PTUN (ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN PADA KASUS PERIZINAN PERTAMBANGAN PT. TMS)." *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 24, no. 2 (2023): 300–315.

Ali, Firli Fahresi Arfisal. "PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN." *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 8 (2021): 8.

Amalia, Riska Ari, Ashari Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan. "Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Perspektif Hukum*, November 8, 2024, 195–215.

Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23.

Arwanto, Bambang. "Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD)." *JATISWARA* 33, no. 2 (2018).

Asimah, Dewi, Zainal Muttaqin, and Dewi Kania Sugiharti. "IMPLEMENTASI PERLUASAN KOMPETENSI PTUN DALAM MENGADILI

TINDAKAN FAKTUAL (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD/OOD).” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 152–70.

Asmuni, Asmuni. “Eksekusi Putusan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara.” *JATISWARA* 35, no. 3 (2020)..

ASNANI, MULTI SRI. “REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGABAIAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT.” Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Azrianti, Seftia, Tuti Herningtyas, Agus Riyanto, and Indra Sakti. “PROSEDUR PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA.” *PETITA* 3, no. 2 (2021): 272–79.

Azzahra, Farida. “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum).” *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 2.

Basuki, Edy. “IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI.” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 2 (2022): 2.

Darmono, Liliana Sysylia. *MASALAH EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA | ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. October 23, 2023.

Fahrunnisa, Anang Puji Utama, and Bayu Setiawan. “Penguatan Eksekutabilitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara: Urgensi Pembentukan Peraturan Pemerintah Sebagai Peraturan Pelaksana.” *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)* 5, no. 9 (2025): 7097.

Faisal, Fatma. “UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA.” *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 1 (2024): 1–9.

Faturahman, Muhammad Reza, and Pratama Herry Herlambang. “Tinjauan Yuridis

Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 7, no. 1 (2025): 116–25.

Fegi, Fegi, Khairani Khairani, and Hengki Andora. "Kepatuhan Kepala Daerah dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap: Execution of State Administrative Court Decisions That Have Permanent Legal Force By Regional Heads." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1129–35.

Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 3.

Hakim, M. Aunul, and Sheila Kusuma Wardani Amnesti. "Problematika penanganan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 14, no. 1 (2022): 1.

Hamimah, Siti, Rohendra Fathammubina, Deni Nuryadi, Bambang Sutedja, and Candra Hayatul Iman. "FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 10 (2024): 4296–308.

Harjiyatni, Francisca Romana, and Suswoto Suswoto. "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 4 (2017): 601–24.

Hengki and Abd Muni. "Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 2 (2023): 121–37.

Hente, Julman. "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menguji Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024): 3.

Heriyanto, Bambang. "LEGAL OVERVIEW IN THE IMPLEMENTATION OF DWANGSOM (FORCE MONEY) IN ADMINISTRATIVE COURT." *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (2021): 141–56.

Herlambang, Pratama Herry, Dani Muhtada, Nugroho Wahyu Pratama, Candra Aditya, Miftah Santalia, and Habiby Abil Fida Safarin. *Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Upaya Peningkatan Eksekusi Putusan Pengadilan*. n.d.

Herlambang, Pratama Herry, Tri Sulistiyono, and Faridhotun Ridho. "PERAN PENGADILAN DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG." *Indonesian State Law Review* 3, no. 1 (2020): 1.

Hr, Ridwan, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 2 (2018): 2.

Hulu, Klaudius Ilkam, Dalinama Telaumbanua, and Fianusman Laia. *AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA*. 3, no. 2 (2024).

Huroiroh, Ernawati, and Wahidur Roychan. "Penyelesaian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Non Executable." *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 2 (2024): 73–94.

Ihfan, Awaludin Nur. "Problematika Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang." *Media Iuris* 7, no. 1 (2024): 69–100.

Ilham, Ach Nadzirun. "PERAN PTUN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ATAS TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM." *Dinamika* 28, no. 9 (2022): 9.

Illahi, Beni Kurnia, Ikhbal Gusri, and Gianinda Audrine Sugianto. "Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN Dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu." *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 87–98.

Jiwantara, Firzhal Arzhi, and Siti Hasanah. "PELAKSANAAN PROSEDUR EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN ADMINISTRASI ANTARA INDONESIA DENGAN THAILAND." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 4 (2021): 571–86.

Kartini, Murtiningsih, and Adi Kusyandi. “EKSISTENSI PTUN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARGA NEGARA DARI SIKAP TINDAK ADMINISTRASI NEGARA.” *Yustitia* 7, no. 2 (2021): 2.

Khairunnisa, Salsabila Shafa, Faiqotus Silvia, and Moh Imam Gusthomi. “Penegakkan Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Proses Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2025): 33–43.

Khofifah, Widias Laini Nur. “Problematika Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Melalui Uang Paksa (Dwangsom) Di Indonesia.” *Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 2 (2024): 195–210.

Khoiriyyah, Nizar Naufal. “Studi Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.” *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 6 (2022): 776–85.

Kimberly, Vanessha Louise, and Anya Sitara Budidarsono. “Peran PTUN Dalam Mewujudkan Good Governance.” *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025): 1.

Koraag, Satria. “TERJADINYA SENGKETA TATA USAHA NEGARA AKIBAT DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA.” *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 7 (2021): 7.

Kurniawan, Basuki. “HAKIKAT PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI ALAT PAKSA BADAN BAGI PEJABAT/ PEJABAT TUN UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN ADMINISTRASI.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2023): 295–322.

Lahopang, Silvia Rahmawati. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.” *LEX ADMINISTRATUM* 6, no. 3 (2018).

Latief, Syafrijal, and Anna Erliyana Chandra. “Penerapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administrasi: Perbandingan Indonesia, Australia Dan Belanda.” *Journal of Judicial Review* 22, no. 2 (2020): 215–28.

Liliana Sysylia Darmono. “MASALAH EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 132–43.

Lumbanraja, Brata Yoga. "E-FLOATING EXECUTION: INOVASI EKSEKUSI ELEKTRONIK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PROGRESIF." *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 2 (2024): 109–19.

Lumbanraja, Brata Yoga, Yos Johan Utama, and Aju Putrijanti. "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA LINGKUGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG NOMOR : 064/G/2014/ PTUN SMG)." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 3 (2019): 1780–91.

Masloman, Nadila. "KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)."*LEX ADMINISTRATUM*10, No. 3, (2022).

Maulidina, Bertha, Silvia Ratna Anzani, and Vianna Novita Kristya. "PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BERBASIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE." *YUSTISI* 10, no. 1 (2023): 1.

Mulyana, Momon. "Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap." *HUMANIORUM* 2, no. 3 (2024): 17–26.

Mulyana, Momon, and Aria Caesar Kusumaatmaja. "EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP." *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* 3, no. 1 (2022): 1.

Mustari, Zir Nuriyah, Achmad Rifai, Win Yuli Wardani, and Nadir Nadir. "KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Analisis Perkara Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PN.Pmk)." *Jurnal Yustitia* 24, no. 2 (2023): 2.

Mustikaningsih, Rahmah Mutiara, and Anna Erliyana. "HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA STUDI KASUS PUTUSAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DPD." *JUSTISI* 7, no. 1

(2021): 38–51.

Nadiyya, Ahsana. “URGENSI CONTEMPT OF COURT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN THAILAND.” *Yustitia* 8, no. 1 (2022): 48–61.

Nahak, Alfonsus. “PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM GUSTAV RADBRUCH.” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023).

Nuna, Muten, Roy Marthen Moonti, Arifin Tumuhulawa, and Dince Aisa Kodai. “KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT.” *University Of Bengkulu Law Journal* 5, no. 2 (2020): 2.

Nurhidayati, Syssy, and Arif Wibowo. “Konsekuensi Kompetensi Absolut Terhadap PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, December 1, 2023, 118–28.

Nusantara, Muhammad Qabul, and Wahyu Andrianto. “Peran Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.” *PALAR (Pakuan Law review)* 8, no. 4 (2022): 4.

Palapessy, Carolene Agatha, Karina Kohir, Helga Gitta, and Enos Paselle. “Tinjauan Yuridis Terkait Gugatan Nomor 284/G/Tf/2023/Ptun Jakarta Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Dari Perspektif Unsur Keputusan Tata Usaha Negara.” *Journal Evidence Of Law* 2, no. 3 (2023): 3.

Pamungkas, Yogo. “PERGESERAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 339–59.

Pattipawae, Dezonda Rosiana. “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi.” *SASI* 25, no. 1 (2019): 92.

Prahastapa*, Anita Marlin Restu, Lapon Tukan Leonard, and Ayu Putriyanti. “FRIKSI KEWENANGAN PTUN DALAM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 BERKAITAN DENGAN OBJEK SENGKETA

TATA USAHA NEGARA (TUN).” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 2..

Pratama, I. Wayan Dedy Cahya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 2.

Pratama, Surya Mukti, Adrian E. Rompis, and R. Adi Nurzaman. “Kewenangan PTUN Dalam Memeriksa Surat Presiden Tentang RUU Cipta Kerja Dan Implikasi Putusannya.” *Risalah Hukum*, June 28, 2021, 11–25.

Putra, F. A. Satria. “Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.” *JUSTISI* 7, no. 1 (2021): 1.

Putra, F A Satria. “Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.” *JUSTISI* 7, no. 1 (2021): 66–75.

Putri, Viorizza Suciani, Ahmad Ahmad, and Mohamad Hidayat Muhtar. “Antara Otoritas dan Otonomi : Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 3.

Putrijanti, Aju. “KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 Tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.” *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 4.

Rahmadani, Ajeng, and Ari Retno Purwanti. *PERAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERANGKAT DESA*. 4, no. 2 (2020).

Rahmah, Uul Fathur. *KEWENANGAN DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS*. 01, no. 01 (n.d.).

Rama, Yosef. “EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN ATAS PERKARA PERTANAHAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.” *Borneo Law Review* 2, no. 2 (2018): 125–40.

Ramadhan, Nurfajrin, and Nila Sastrawati. “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 1 (2022): 1.

Rayhan, Ahmad, and Sakti Krisna Wijaya. “Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara.” *Jurnal Peradaban Hukum* 1, no. 1 (2023): 1.

Ritonga, Francois Geny, and Caroline Zilena Marbun. “KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SUATU KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU).” *Honeste Vivere* 35, no. 1 (2025): 1.

Rohaedi, Edi, Nandang Kusnadi, Bambang Heriyanto, and Nuradi. “KEDUDUKAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 9, no. 2 (2023): 2. Rumadan, Ismail. “PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 435.

Safitri, Erna Dwi, and Nabitatus Sa’adah. “Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 34–45.

Salsabila Firdausiyah. “Tinjauan Yuridis Normatif Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG Tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor Oleh PTUN Bandung).” Diploma, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC, 2024.

Sanaki, Abdul Anwar, Djohermansyah Djohan, and Sampara Lukman. “Revitalisasi Peran Perangkat Kewilayahan Melalui Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Fakfak Kepada Kepala Distrik Fakfak.” *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 9, no. 2 (2023): 59–72.

Santoso, Bagus Teguh, Samuel Dharma Putra Nainggolan, Jamalum Sinambela, and Kholilur Rahman. “Optimalisasi Peran Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2015.” *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 01 (2023): 21–32.

Sari, Leona Putri, and Arif Wibowo. “Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Pengadilan Tata Usaha Negara, Hukum, Indonesia, Putusan Pengadilan.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 1.

Sari, Tessya. “PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.” Preprint, OSF, February 5, 2021.

Sharon, Grace. “TEORI WEWENANG DALAM PERIZINAN.” *JURNAL HUKUM JUSTICE* 2, no. 4 (2022): 8–16.

Silvia, Faiqotus, Salsabila Shafa Khairunnisa, and Moh Imam Gusthomi. *Penegakkan Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Proses Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara*. 23 (2025).

Situngkir, Danel Aditia. *MENGENAL TEORI DEMOKRASI DAN TEORI KEWENANGAN DALAM ILMU HUKUM*. 5 (2023).

Socawibawa, Nur Indra, and Arif Wibowo. “EFEKTIFITAS EKSEKUSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA : Peradilan, Tata Usaha Negara, Eksekusi Putusan, Efektifitas.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 1.

Soleh, Mohammad Afifudin. “EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP.” *Mimbar Keadilan*, ahead of print, 2018.

Somantri, Dikdik. “CHALLENGES IN EXECUTION OF COURT DECISION TO STRENGTHEN THE ADMINISTRATIVE COURT CHARISMA.” *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (2021): 123–40.

Sugiharto, Hari, and Bagus Oktafian Abrianto. “UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA.” *Arena Hukum* 11, no. 1 (2018): 24–47.

Sugita, I. Made. “Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Lembaga Peradilan Khusus di Indonesia dengan Konsekuensinya.” *VYAVAHARA DUTA* 19, no. 1 (2024): 1.

Sukri, Indah Fitriani, and Anna Erliyana. “KONSEP PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA: MENGUJI ASAS PRESUMTIO IUSTAE CAUSA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022).

Suyanto, Wulan Febriyanti Putri. “EFEKTIVITAS EKSEKUSI UPAYA PAKSA.” *JURNAL AL TASYRI’IYYAH*, June 19, 2022, 34–47.

Syam, Fauzi, Sukamto Satoto, and Helmi Helmi. “Politik Hukum Pemberian

Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 1.

Tayib, Abdul. "EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004." *GANEC SWARA* 15, no. 1 (2021): 880.

Tj, Indra Utama, Muhammad Azhali Siregar, and Muhammad Juang Rambe. "PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS TANAH (STUDI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN)." *CERMIN: Jurnal Penelitian* 6, no. 1 (2022): 193–206.

TORISNA YULIZAR, -. "ANALISIS KONSEP EKSEKUSI DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA PTUN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH WILAYAH AL-MUZALIM)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Utama, Nico Handoko, and Anna Erliyana. "KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PTUN DAN IMPLIKASI DALAM PELAKSANAANNYA." *PALAR (Pakuan Law Review)* 6, no. 2 (2020): 2.

Wahyudi, Ari. "Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif." *Politea : Jurnal Politik Islam* 4, no. 1 (2021): 121–45.

Wicaksono, Dian Agung, Bimo Fajar Hantoro, and Dedy Kurniawan. "QUO VADIS PENGATURAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENERIMAAN PERMOHONAN FIKTIF POSITIF PASCA PENATAAN REGULASI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 323–37.

Yani, Muhammad Akbar, Helmi Helmi, and A. Zarkasi. "KEPASTIAN HUKUM MEKANISME PENGENAAN UANG PAKSA PADA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2024): 395–415.

Yanti, Herma, and Masriyani Masriyani. "IMPLEMENTASI PERLUASAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI." *Legalitas: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2019): 2.

Yanti, Rosida, Enos Paselle, and Siti Kotijah. "Kajian Hukum Terhadap 'Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor 10/G/2023/PTUN.SMD.' Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Samarinda Atas Penerbitan Surat Pemberhentian Dalam Jabatan." *JURNAL JUSTIQA* 5, no. 2 (2023): 2.

Yulius, Nfn. "DISKURSUS LEMBAGA EKSEKUSI NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA / THE DISCOURSE OF STATE EXECUTION INSTITUTION IN INDONESIAN LAW ENFORCEMENT." *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 11–32.